



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 13 Januari 2020

Halaman: 2

Warga Non KSJPS Jangan Diabaikan

UMBULHARJO (MERAPI) - Data penerima Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) tahun 2020 Kota Yogyakarta telah ditetapkan. Namun Pemkot Yogyakarta tetap diminta memberikan perhatian kepada masyarakat menengah yang tidak masuk dalam KSJPS. Pasalnya masyarakat golongan ekonomi menengah yang tak masuk KSJPS rentan mengalami miskin.

Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi Setiawan, keluarga pemilik KSJPS atau Kartu Menuju Sehat (KMS) seperti memiliki kartu sakti untuk mengakses berbagai bantuan dan program dari Pemkot Yogyakarta dengan lebih mudah. Misalnya program Gandeng Gendong dan pelatihan-pelatihan. Kondisi itu dinilainya membuat warga ingin mendapat KMS. Namun diakuinya kriteria KMS cukup ketat, sehingga tidak bisa masuk.

"Tapi ada juga hal-hal yang secara teknis sebenarnya memang susah untuk dimasukkan kriteria KSJPS. Terutama masyarakat golongan menengah karena secara ekonomi di atas garis kemiskinan. Cuma kalau sakit parah, bisa langsung jadi di bawah garis kemiskinan. Ini yang justru tidak bisa kita bantu," terang Krisnadi, Minggu (12/1).

Dengan kondisi tersebut pemerintah diminta tidak hanya mengutamakan pemberian akses KSJPS. Dia mencontohkan pengangguran yang membutuhkan pelatihan kerja maupun keterampilan belum tentu masuk KSJPS. Hal itu dinilainya menjadi persoalan sehingga diharapkan pemerintah bisa memberikan kesempatan pengangguran non KSJPS juga bisa ikut pelatihan. "Kami harap pelatihan bisa lebih tepat sasaran. Tak hanya penerima KSJPS tapi juga pengangguran yang tidak masuk KSJPS," imbuhnya.

Selain itu pihaknya juga mendorong penerapan upah minimum sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya upah sektoral bidang pariwisata seperti hotel maupun restoran. Dia menyebut upah sektoral itu sudah masuk kajian Komisi D dan diharapkan bisa diterapkan tahun 2021.

"Kami harap juga tidak perlu gembar-gembor Yogya meski pun miskin tapi bahagia. Bahagia dari mana kalau biaya kesehatan, biaya hidup mahal dan transportasi mahal. Pendidikan gratis tapi butuh akomodasi. Bahagia bisa hilang kalau sakit sedikit langsung miskin. Tidak pas jika Yogya miskin tapi bahagia," jelas Krisnadi.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005